

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dengan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan Desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pembangunan ekonomi dalam konteks regional, pada dasarnya sama dengan pembangunan nasional secara keseluruhan, oleh karena yang

menjadi pokokpermasalahannya sama yaitu mengatasi kemiskinan, pengangguraan, ketimpangan dan berbagai masalah lainnya. Permasalahan tersebut dalam proses pembangunan dapat diatasi dengan menentukan kebijakan dan program pembangunan tertentu seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta program pembangunan lainnya yang disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan dari masyarakatnya.

Pelaksanaan pembangunan daerah dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka daerah akan berusaha mengembangkan sektor-sektor perekonomian sesuai keunggulan daerahnya. Keunggulan dari sektor ekonomi daerah ini diprioritaskan dan dikembangkan, dikarenakan sektor tersebut mempunyai permintaan nasional atau ekspor yang tinggi yang akan berdampak bagi peningkatan perekonomian daerah tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila biaya produksi rendah, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam perekonomian yang lebih luas. Daya saing suatu daerah dapat diketahui melalui proses pembangunan antar daerah (antar regional) maupun internasional, sehingga dalam jangka panjang sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing akan menjadi spesialisasi dan andalan daerah. Selain itu pembangunan tidak dapat mengabaikan pertumbuhan ekonomi, oleh karena pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian agar pertumbuhan menjadi seiring dengan pemerataan regional, maka setiap daerah harus memiliki

spesialisasi sektoral sesuai dengan keunggulan sumber daya yang dimiliki, dan ini harus diikuti oleh kebijakan ekonomi regional dari pemerintah pusat untuk mengatasi kemungkinan kesenjangan antar daerah kaya dan daerah miskin.

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator lain adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi (Syafrizal, 2008). Kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam kegiatan basis dan kegiatan non-basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat *exogenous* (tidak tergantung pada kekuatan internal/permintaan lokal). Sedangkan kegiatan non-basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan di atas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu analisis basislah yang sangat berguna

untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2004).

PDRB Kabupaten Belu menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori/sektor lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Gambaran untuk setiap kategori lapangan usaha akan diuraikan lebih jauh pada masing-masing sub bagian.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu 2011 – 2015

Tahun	PDRB Harga Konstan		PDRB Harga Berlaku	
	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2011	1.913.241,3	4,29	1.998.222,0	8,93
2012	2.014.208,9	5,25	2.225.315,6	11,36
2013	2.135.803,7	6,04	2.483.211,2	11,59
2014	2.254.841,2	5,57	2.769.989,4	11,55
2015	2.378.689,9	5,49	3.077.097,2	11,09

Sumber : BPS Provinsi NTT, PDRB Kabupaten Belu Tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel 1.1, selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu menunjukan gambaran yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sebesar 4,29 persen, kemudian naik menjadi 5,25 persen di tahun 2012, dan kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 6,04 persen, Namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 5,57 persen, dan kemudian turun lagi menjadi 5,49 persen di tahun 2015. Sementara laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu berdasarkan harga berlaku pada tahun 2011 yaitu

sebesar 8,93 persen, yang kemudian naik menjadi 11,36 persen di tahun 2012. Kemudian naik lagi menjadi 11,59 persen di tahun 2013, seterusnya mengalami penurunan menjadi 11,55 persen di tahun 2014. Namun mengalami penurunan kembali di tahun 2015 yaitu sebesar 11,09 persen.

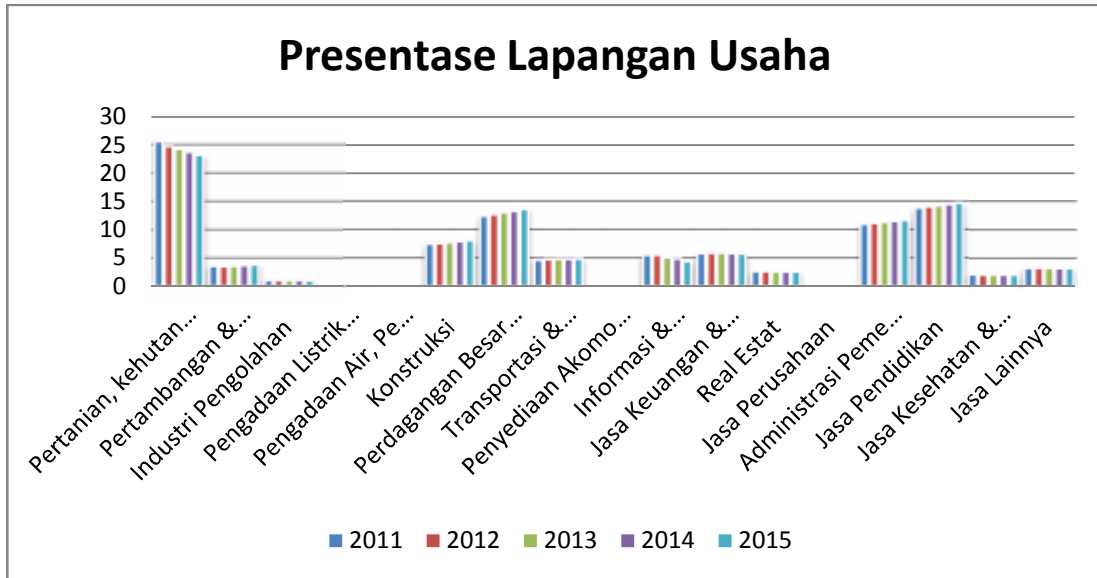
Tabel 1.2
Peranan PDRB Kabupaten Belu Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2015

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014*)	2015**)
A	Pertanian, kehutanan & perikanan	25,59	24,73	24,22	23,75	23,22
B	Pertambangan & Pengegalian	3,64	3,60	3,66	3,75	3,84
C	Industri Pengolahan	1,14	1,15	1,15	1,13	1,11
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	7,50	7,64	7,80	7,96	8,15
G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,41	12,74	13,05	13,31	13,61
H	Transportasi & Pergudangan	4,67	4,75	4,83	4,84	4,86
I	Penyediaan Akomodasi & Makanan Minum	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36
J	Informasi & Komunikasi	5,57	5,58	5,13	4,86	4,46
K	Jasa Keuangan & Asuransi	5,88	5,89	5,93	5,85	5,78
L	Real Estat	2,68	2,65	2,64	2,62	2,62
MN	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	11,00	11,18	11,34	11,52	11,68
P	Jasa Pendidikan	13,83	14,06	14,27	14,47	14,72
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,23	2,17	2,17	2,14	2,16
RST U	Jasa Lainnya	3,36	3,37	3,34	3,31	3,30
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber BPS Provinsi NTT, PDRB Kabupaten Belu Tahun 2011-2015

Keterangan = * : Angka sementara
**** : Angka sangat sementara**

Tabel 1.2
Peranan PDRB Kabupaten Belu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015



Sumber BPS Provinsi NTT, PDRB Kabupaten Belu Tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sumbangsih terbesar PDRB Kabupaten Belu pada tahun 2015 masih berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 23,22 persen dari nilai total PDRB. Namun demikian, dari data yang ada terlihat bahwa sumbangsih dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Belu cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan sumbangsih sebesar 25,59 persen dari total nilai PDRB, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 24,73 persen, penurunan tersebut terus terjadi pada tahun 2013, 2014 dan terakhir 2015.

Sedangkan sektor lain yang memberikan sumbangsih signifikan terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Belu adalah sector jasa pendidikan dan perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kedua sektor tersebut pada tahun 2015 masing-masing memberikan sumbangsih sebesar 14,72 persen dan 13,61 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Belu. Sementara sektor yang memberikan sumbangsih terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan sumbangsih sebesar 0,02 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Belu.

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi diharapkan agar masing-masing daerah mampu berusaha sendiri untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalian dan penggunaan potensi daerah yang tepat merupakan jalan terbaik, sebab tanpa memperhatikan hal tersebut pembangunan tidak akan berjalan dengan efektif. Akan tetapi hal ini tergantung pada masing-masing daerah, dikarenakan antar daerah mempunyai sektor-sektor unggulan atau sektor basis yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemetaan Sektor Unggulan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Belu”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun beberapa topik yang penulis ambil sebagai rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni :

1. Apa saja sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Belu?
2. Apa saja sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi di Kabupaten Belu?
3. Apakah Kabupaten Belu termasuk dalam daerah maju, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang atau daerah relatif terbelakang yang diklasifikasi berdasarkan Tipology Klassen?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini yakni :

1. Mengetahui sektor unggulan yang ada di Kabupaten Belu.
2. Mengetahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi di Kabupaten Belu.
3. Mengetahui Kabupaten Belu termasuk dalam daerah maju, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang atau daerah relatif terbelakang yang diklasifikasi berdasarkan Tipology Klassen.

1.4 Manfaat Penulisan

Sedangkan manfaat dari penulisan proposal ini yakni :

1. Bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk di pertimbangkan dalam mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan daerah
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk penelitian lebih lanjut
3. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Gelar sarjana ekonomi jurusan pembangunan pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang